

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional*. (2007). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2011). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014*. (2013). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang *Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. (2013). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang *Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. (2015). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2005). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2005). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*. (2000). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*. (2003). Jakarta.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*. (2004). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*. (2014). Jakarta.
- Aprilla, N. dan Saputra R.A. (2013). 'Pengaruh flypaper effect, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di indonesia'. *Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No.2. Universitas Bengkulu. hlm. 107-132.
- Ariani, R.K & Putri, A.G. (2016). 'Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah'. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784. hlm 364-369.
- Darmayasa, N.I dan Bagiada, M.I. (2013). 'Pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak sebagai penopang kemandirian keuangan daerah'. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.09 No.02. Politeknik Negeri Bali.hlm 121-129.
- Darsono, I.L. (2013). 'Pengaruh alokasi belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah'. *Jurnal Profita*. Universitas Negeri Yogyakarta. hlm 11-21.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2008). 'Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi bali tahun 2002 – 2006'. *Jurna Ilmiah*. Universitas Udayana. hlm. 01 - 21.
- Edogbanya, Adejoh & Mr. Ja'afaru G. Sule, (2013). 'Revenue generation : it's impact on government developmental effort (a study of selected local council kogi east senatorial district)'. *Global Journal of Management and Business Research Administration and Management*. Volume 13, Issue 4, Version 1.0.

- Ernawati (2017). 'Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah'. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. ISSN 2460-0585. Vol 6. No. 2. STIESIA Surabaya. hlm 532-545.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 23* : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2014). *Corporate social responsibility*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Edisi 4, Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2013). *Teori akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imawan, R. dan A. Wahyudin. (2014). 'Analisis kemandirian keuangan daerah'. *Accounting Analysis Journal* 3(2): 147-155.
- Kadafi, M dan Putra, W.W. (2013). 'Kemandirian keuangan daerah (studi kasus pemerintah kota samarinda tahun 2001-2010)'. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-2*. hlm 1-14.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi csr & reformasi paradigma binsis & akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria, N. (2017). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota di provinsi bengkulu'. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol.1 No.1. Politeknik Negeri Sriwijaya. hlm 60-73.
- Marizka, R. (2013). 'Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi manajemen ykpn khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di sumatera barat (Tahun 2006 – 2011)'. Universitas Negeri Padang. hlm 2 – 22.

- Naganathan, M & Sivagnanam, J.K. (2000). 'Federal transfer and the tax effort of the states in india'. *Indian Economic Journal*. Vol. 47 No. 04. University of Madras.hlm 252-281.
- Nggilu, F., Sabijono, H. & Tirayoh, V. (2016). 'Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi gorontalo'. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.04. Universitas Sam Ratulangi Manado. hlm 623-635.
- Novalistia, L.R. (2016). 'Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten atau kota di provinsi jawa tengah'. *Journal Of Accounting*. Vol.02 No.02. Universitas Pandanaran Semarang. hlm 1 – 25.
- Nugraha, I.P.B.I.M. dan Dwirandra, A.A.N.B. (2016). 'Kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dbh pada belanja modal'. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.14 No.1. Universitas Udayana. hlm 284-311.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*.Vol. 2, No. 1.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sekaran, U. (2006). *Research methods for business, Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyoto, D. (2011). Analisis regresi dan uji hipotesis. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS
- Susanti, D.B., Rahayu, S. & Yudowati, S.P. (2016). 'Pengaruh pendaparan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah stusi pada kota/kabupaten di provinsi jawa barat tahun 2010 – 2014'. *e - Proceeding of Management*, Vol.3 No.03. Universitas Telkom. hlm 3308 – 3314.
- Tjahjono & Oktavianti. (2016). 'Pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi diy'. *Jurnal Kajian Bisnis* Vol.24. No.1. 2016. hlm 25-34.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. (2016). *Pedoman penulisan tugas akhir skripsi tahun 2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.hlm 2-48.

Untung, J., Widyastuti, T. & Suyanto. (2017). ‘Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah dan dana bagi hasil sebagai pemoderasi pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa barat periode 2010-2014’. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*. Vol.1. No.2. Univeristas Pancasila. hlm 1-7.

Wong, D.J. (2004). ‘The fiscal impact of economic growth and development on local government capacity’. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Vol.16, No. 03. hlm 413-42.

